



# **MATERI KEJUANGAN**

- 1. PENDIDIKAN PANCASILA**
- 2. SEJARAH PERJUANGAN TNI/TNI AL**
- 3. NILAI-NILAI TNI 1945**
- 4. NASIONALISME**

## DAFTAR ISI

	Halaman
COVER .....	i
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDIDIKAN PANCASILA .....	3
1. Landasan Pendidikan.....	3
2. Tujuan Pendidikan Pancasila .....	4
3. Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa.....	8
4. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat .....	9
5. Pancasila Sebagai Etika Politik .....	9
6. Pancasila Sebagai Ideologi Nasional .....	10
7. Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia.....	10
BAB II SEJARAH PERJUANGAN TNI/TNI AL .....	12
8. Sejarah Perjuangan TNI AL. ....	12
9. Makna Pembelajaran Sejarah .....	18
10. Membangun Nilai-Nilai Kepahlawanan.....	19
BAB III NILAI-NILAI TNI 1945 .....	23
11. Pewarisan nilai-nilai 45 kepada generasi muda TNI .....	23
12. Rumusan Jiwa, Semangat, dan Nilai-nilai 45 .....	25
13. Metode pelestarian jiwa, semangat dan nilai - nilai 45 .....	25
14. Pola pelaksanaan Pelestarian jiwa, semangat dan nilai - nilai 45. ....	26
15. Pewarisan Nilai-nilai Proklamasi .....	27
16. Ruang Lingkup .....	29
BAB VI NASIONALISME .....	31
17. Pengertian Nasionalisme .....	31
18. Prinsip-prinsip Yang Terkandung Dalam Nasionalisme .....	33
19. Patriotisme .....	34
20. Membangun Karakter ( <i>Character Building</i> ).....	35
21. Wawasan Kebangsaan (Wawasan Nusantara).....	36
22. Rasa Cinta Tanah Air.....	37
5. DAFTAR PUSTAKA.....	38

## **BAB I**

### **PENDIDIKAN PANCASILA**

#### **1. Landasan Pendidikan.**

Pancasila adalah dasar filsafat Negara Republik Indonesia yang resmi disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita RI Tahun II No.7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945, TAP MPR Tahun 1998 No: XVIII/MPR/1998, dan menjadi dasar landasan pendidikan pancasila:

##### **a. Landasan Historis**

- 1) Terbentuk melalui proses panjang sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia.
- 2) Suatu prinsip tersimpul dalam pandangan dan filsafat hidup bangsa berupa ciri khas, sifat, dan karakter yang berbeda dengan bangsa lain.
- 3) Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri

##### **b. Landasan Kultural**

- 1) Setiap bangsa memiliki ciri khas dan pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain.
- 2) Sila-sila Pancasila merupakan karya besar bangsa yang diangkat melalui nilai-nilai kultural bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis pendiri negara, diantaranya: Ir. Soekarno, Moh. Yamin, Moh. Hatta, Soepomo
- 3) Sila-sila Pancasila merupakan hasil pemikiran tentang bangsa dan negara yang mendasarkan pandangan hidup suatu prinsip nilai.

##### **c. Landasan Yuridis**

- 1) UU No.20 Tahun 2003 memuat Sistem Pendidikan Nasional di PerDosenan Tinggi. Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa sistem pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila.

2) UU PT No. 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat (3) berisi kurikulum (jenis/jalur/jenjang) dinyatakan wajib memuat mata kuliah Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan serta bahasa Indonesia.

3) SK Dirjen PT: SK No.43/DIKTI/KEP/2006 dijelaskan bahwa Misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah **“untuk memantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta Tanah Air”**.

#### d. Landasan Filosofis

1) Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan Filosofis bangsa Indonesia merupakan suatu keharusan moral untuk merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berketuhanan dan berkemanusiaan.

2) Syarat mutlak suatu negara adalah adanya Negara berpersatuan dan berkerakyatan (rakyat unsur pokok.)

3) Konsekuensi rakyat dasar ontologis demokrasi karena asal mula kekuasaan negara dan sekaligus unsur pokok adalah rakyat

## 2. Tujuan Pendidikan Pancasila

UU No.20 Tahun 2003 memuat Sistem Pendidikan Nasional di PerDosenan Tinggi. Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa sistem pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan SK Dirjen PT: SK No.43/DIKTI/KEP/2006 tujuan materi pancasila dalam rambu rambu kepribadian mengarahkan pada moral yang diharapkan terwujudnya dalam kehidupan sehari hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pendidikan adalah seperangkat tindakan intelektual penuh tanggung jawab yang berorientasi pada kompetensi dan bidang profesi masing-masing yang mempunyai Kemampuan bertanggung jawab sesuai hati nurani, mengenali masalah hidup, kesejahteraan dan solusi, perubahan dan perkembangan Ilmu pengetahuan, Teknologi, Seni.

#### a. Pembahasan Pancasila Secara Ilmiah

Syarat ilmiah Pembahasan Pancasila menurut buku “Tahu dan Pengetahuan” karangan I.R. Poedjawijatno ada 4, yaitu:

### 1) Berobjek.

- a. Objek Forma adalah Sudut pandang tertentu dalam Pembahasan Pancasila. Pancasila dapat dipandang dari sudut Moral Moral Pancasila, Ekonomi Pancasila, Pers Pers Pancasila, Filsafat Filsafat
- b. Objek Materia adalah suatu objek yang merupakan sasaran pengkajian pancasila baik bersifat empiris dan non empiris Bangsa Indonesia dengan segala aspek budayanya yang meliputi: Non Empiris Budaya Empiris Adat Istiadat, Moral Bukti Sejarah, Religius Naskah Kenegaraan, Lembaran Sejarah

### 2) Bermetode

Setiap pengetahuan Ilmiah harus memiliki metode yaitu seperangkat cara atau pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila untuk mendapatkan suatu Kebenaran yang objektif dengan metode:

- a) Analitico Syntetic: Metode pembahasan Pancasila yang merupakan perpaduan metode analisis dan sintetis
- b) Hermeneutika: Digunakan untuk menemukan makna dibalik objek
- c) Koherensi Historis
- d) Pemahaman, Penafsiran dan Interpretasi

**3) Bersistem.** Suatu Pengetahuan Ilmiah harus merupakan suatu yang bulat dan utuh dan saling berhubungan (interelasi) maupun Koheren (runtut) Sehingga sila-sila Pancasila menjadi kesatuan yang sistematis

**4) Bersifat Universal.** Kebenaran suatu pengetahuan ilmiah harus bersifat universal artinya kebenaran tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi, kondisi, dan jumlah.

### b. Pengertian Pancasila.

- 1) Bahasa Sanskerta India
  - ❖ Panca : lima
  - ❖ Syila : batu sendi, alas, dasar
  - ❖ Syiila : peraturan tingkah laku yang baik

- Berbatu sendi 5 Dasar yang memiliki 5 unsur
- 2) Kitab Tripitaka: Suttha Pitakao Abhidama Pitakao Vinaya Pitaka
- 3) Five Moral Principles, menurut Budha :
  - ❖ Mateni : Membunuh
  - ❖ Maling : Mencuri
  - ❖ Madon : Berzina
  - ❖ Mabok : Mabul
  - ❖ Main : Berjudi

**c. Secara Historis**

- 1) Menurut Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)
  - a) Peri Kebangsaan
  - b) Peri Kemanusiaan
  - c) Peri Ketuhanan
  - d) Peri Kerakyatan
  - e) Kesejahteraan Rakyat

Yang dituangkan menjadi:

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa
  - b) Kebangsaan persatuan Indonesia
  - c) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  - d) Keadilan social bagi seluru rakyat Indonesia
- 2) Menurut Ir. Soekarno (1 Juni 1945)
    - a) Nasionalisme / Kebangsaan Indonesia
    - b) Internasionalisme atau Perikemanusiaan
    - c) Mufakat / Demokrasi
    - d) Kesejahteraan Sosial

- e) Ketuhanan yang Berkebudayaan

Dalam perkembangannya PANCASILA diusulkan menjadi TRISILA yang berisi:

- a) Sosio Nasional: Nasionalisme dan Internasionalisme
- b) Sosio Demokrasi: Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat
- c) Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam perkembangannya TRISILA diusulkan menjadi EKASILA yang merupakan gotong royong.

3) Menurut Piagam Jakarta (22 Juni 1945).

- a) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- b) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c) Persatuan Indonesia
- d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan
- e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

**d. Secara Terminologis**

1) Bagian UUD 1945

- a) Pembukaan (4 alinea)
- b) 37 Pasal
- c) Peraturan Peralihan (4 pasal)
- d) Aturan Tambahan (2 ayat)

2) Konstitusi RIS (berlaku sejak 29 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950)

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa
- b) Peri Kemanusiaan
- c) Kebangsaan
- d) Kerakyatan

- e) Keadilan Sosial
- 3) UUDS 1950 (berlaku sejak 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959)
  - a) Ketuhanan Yang Maha Esa
  - b) Peri Kemanusiaan
  - c) Kebangsaan
  - d) Kedaulatan Rakyat
  - e) Keadilan Sosial
- 4) Kalangan Masyarakat: Pembukaan UUD 1945 dan TAP MPR XX/MPRS/1966 dan INPRES No.12,13 April 1968 menegaskan: Pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila yang sah dan benar adalah PEMBUKAAN UUD 1945

### 3. Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa

Untuk memahami Pancasila secara lengkap dan utuh terutama dalam kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, mutlak diperlukan pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk suatu negara yang berdasarkan suatu asa hidup bersama demi kesejahteraan hidup bersama, yaitu negara yang berdasarkan Pancasila

- a. Zaman Kutai
- b. Zaman Sriwijaya
- c. Zaman Kerajaan-Kerajaan Sebelum Kerajaan Majapahit
- d. Zaman Kerajaan Majapahit
- e. Zaman Penjajahan
- f. Kebangkitan Nasional
- g. Zaman Penjajahan Jepang
- h. Sidang BPUPKI
- i. Proklamasi Kemerdekaan Dan Sidang PPKI
- j. Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan



#### 4. **Pancasila Sebagai Sistem Filsafat**

Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar oskologis sendiri yang berbeda degan sistem filsafat yang lainnya misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme dan lain paham filsafat di dunia.

Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis.

- a. Susunan Kesatuan Sila-sila Pancasila yang Bersifat Organik. Monopluralis merupakan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organik, memiliki hakikat secara filosofis yang bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung dari inti, isi dari sila-sila Pancasila yaitu hakikat manusia.
- b. Susunan Pancasila yang Bersifat Hierarkis dan Berbentuk Piramida

#### 5. **Pancasila Sebagai Etika Politik**

Dalam filsafat Pancasila terkandung di dalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sitematis dan komprehensif (menyeluruh) dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praksis melainkan suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar. Norma-norma tersebut meliputi:

- a. Norma moral: Berkaitan dengan tingkah laku manusia, dapat diukur dari sudut baik maupun buruk.
- b. Norma hukum: Suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral. Etika terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Etika Umum

b. Etika Khusus:

- 1) Etika Individual, membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri
- 2) Etika Sosial, membahas kewajiban manusia terhadap manusia lain.

## 6. Pancasila Sebagai Ideologi Nasional

Setiap kedudukan dan fungsi Pancasila pada hakikatnya memiliki makna serta dimensi masing-masing yang konsekuensi aktualisasinya pun memiliki aspek yang berbeda-beda, walaupun hakikat dan sumbernya sama.

a. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Pandangan hidup yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

b. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia.
- 2) Meliputi suasana kebatinan (Geistlichenhintergrund) dari Undang-Undang Dasar 1945
- 3) Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara.
- 4) Mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

c. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa. Karena ciri khas Pancasila memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia.

## 7. Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama-sama dengan pasal-pasal UUD 1945, disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No.7.

- a. Pembukaan UUD 1945 sebagai Tertib Hukum Tertinggi Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental yaitu :
  - 1) Memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia
  - 2) Memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi.
- b. Pembukaan UUD 1945 Memenuhi Syarat Adanya Tertib Hukum diantaranya adalah: Adanya kesatuan subjek, Adanya kesatuan asas kerohanian, Adanya kesatuan daerah, Adanya kesatuan waktu
- c. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental
- d. Dari segi terjadinya ditemukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak Pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya.
- e. Dari segi isinya memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut: Dasar tujuan negara, Ketentuan diadakannya UUD Negara, Bentuk negara, Dasar filsafat Negara

## **BAB II**

### **SEJARAH PERJUANGAN TNI/TNI AL**

#### **8. Sejarah Perjuangan TNI AL.**

Tanggal 22 Agustus 1945 PPKI dalam rapatnya antara lain memutuskan tentang pembentukan BKR dengan tujuan menjaga keamanan umum dalam negeri. BKR yang unsur-unsurnya terdiri dari darat, laut dan udara sangat disambut oleh semua masyarakat dimana-mana. Sementara itu BKR laut tumbuh disemua kota-kota pelabuhan terutama Jawa, Sumatera dan Kalimantan Selatan. Dan pada tanggal 10 September 1945 menjadi tonggak penting bagi kehadiran Angkatan Laut di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kehadiran BKR Laut ini tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh bahariawan yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine selama masa penjajahan Belanda dan Kaigun pada zaman pendudukan Jepang. Faktor lain yang mendorong terbentuknya badan ini adalah masih adanya potensi yang memungkinkannya menjalankan fungsi Angkatan Laut seperti kapal - kapal dan pangkalan, meskipun pada saat itu Angkatan Bersenjata Indonesia belum terbentuk.

Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR) turut memacu keberadaan TKR Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Sejumlah Pangkalan Angkatan Laut terbentuk, kapal - kapal peninggalan Jawatan Pelayaran Jepang diperdayakan, dan personel pengawaknya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut Republik yang baru terbentuk itu. Kekuatan yang sederhana tidak menyurutkan ALRI untuk menggelar Operasi Lintas Laut dalam rangka menyebarluaskan berita proklamasi dan menyusun kekuatan bersenjata di berbagai tempat di Indonesia. Disamping itu mereka juga melakukan pelayaran penerobosan blokade laut Belanda dalam rangka mendapatkan bantuan dari luar negeri.

Berakhirnya Perang Kemerdekaan menandai pembangunan ALRI sebagai Angkatan Laut modern. Sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), sejak tahun 1949, ALRI menerima berbagai peralatan perang berupa kapal - kapal perang beserta berbagai fasilitas pendukungnya berupa Pangkalan Angkatan Laut. Langkah ini bersamaan dengan konsolidasi di tubuh ALRI, pembenahan organisasi, dan perekrutan personel melalui lembaga pendidikan sebelum mengawaki peralatan matra laut. Selama 1949-1959 ALRI

berhasil menyempurnakan kekuatan dan meningkatkan kemampuannya. Di bidang Organisasi ALRI membentuk Armada, Korps Marinir yang saat ini disebut sebagai Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL), Penerbangan Angkatan Laut dan sejumlah Komando Daerah Maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Peralatan tempur ALRI pun bertambah baik yang berasal dari penyerahan Angkatan Laut Belanda maupun pembeliandari berbagai negara. Penyiapan prajurit yang profesional pun mendapatkan perhatian yang besar dengan pendirian lembaga pendidikan untuk mendidik calon - calon prajurit strata tamtama, bintara, dan perwira, serta pengiriman prajurit ALRI untuk mengikuti pendidikan luar negeri.

Dengan peningkatan kekuatan dan kemampuan tersebut, ALRI menyempurnakan strategi, taktik, maupun teknik operasi laut yang langsung diaplikasikan dalam berbagai operasi militer dalam rangka menghadapi gerakan separatis yang bermunculan pada tahun - tahun 1950 hingga 1959. Dalam operasi penugasan PRRI di Sumatera, Permesta di Sulawesi, DI/TII di Jawa Barat, dan RMS di Maluku, ALRI memperoleh pelajaran dalam penerapan konsep operasi laut, operasi amfibi, dan operasi gabungan dengan angkatan lain. Pada saat kondisi negara mulai membaik dari ancaman desintegrasi, pada tahun 1959 ALRI mencanangkan program yang dikenal sebagai Menuju Angkatan Laut yang Jaya. Sampai tahun 1965 ALRI mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini dilatarbelakangi oleh politik konfrontasi dalam rangka merebut Irian Barat yang dirasa tidak dapat diselesaikan secara diplomatis. Berbagai peralatan tempur Angkatan Laut dari negara Eropa Timur memperkuat ALRI dan menjadi kekuatan dominan pada saat itu. Beberapa mesin perang yang terkenal di jajaran ALRI antara lain kapal penjelajah (cruiser) RI Irian, kapal perusak (destroyer) klas 'Skory', fregat klas 'Riga', Kapal selam klas 'Whisky', kapal tempur cepat berpeluru kendali klas 'Komar', pesawat pembom jarak jauh Ilyushin IL-28, dan Tank Amfibi PT-76. Dengan kekuatan tersebut pada era tahun 1960-an ALRI disebut - sebut sebagai kekuatan Angkatan Laut terbesar di Asia. Ada beberapa operasi laut selama operasi pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan sebutan Operasi Trikora itu. Pada awal Trikora digelar, kapal -kapal cepat torpedo ALRI harus berhadapan dengan kapal- kapal perusak, fregat, dan pesawat Angkatan Laut Belanda di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Komodor Yos Soedarso beserta RI Macan Tutul tenggelam pada pertempuran laut tersebut. Peristiwa yang kemudian dikenang sebagai Hari Dharma Samudera itu memacu semangat untuk merebut Irian Barat secara militer. Pada saat itu ALRI mampu mengorganisasikan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi

terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia. Tidak kurang dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi tersebut. Gelar kekuatan tersebut memaksa Belanda kembali ke meja perundingan dan dicapai kesepakatan untuk menyerahkan Irian Barat ke pangkuan RI.

Politik konfrontasi RI dalam melawan Neo Kolonialisme dan Imperialisme (Nekolim) dilanjutkan pada Operasi Dwikora untuk menentang pembentukan negara Malaysia. Meskipun unsur - unsur Angkatan Bersenjata RI telah disiapkan dalam operasi tersebut, namun operasi hanya sebatas pada operasi infiltrasi. Prajurit - prajurit ALRI dari kesatuan KKO-AL terlibat dalam tahap ini. Sementara unsur - unsur laut menggelar pameran bendera dalam rangka mengimbangi provokasi oleh kekuatan laut negara - negara sekutu. Operasi Dwikora tidak dilanjutkan seiring dengan suksesi pemerintahan di Indonesia pasca Pemberontakan G 30 S/PKI. Sejak tahun 1966 ALRI yang kemudian disebut dengan TNI AL mengalami babak baru dalam perjalanan sejarahnya seiring dengan upaya integrasi ABRI. Dengan adanya integrasi ABRI secara organisatoris dan operasional telah mampu menyamakan langkah pada pelaksanaan tugas di bidang pertahanan dan keamanan sehingga secara doktrinal, arah pengembangan kekuatan dan kemampuan setiap angkatan menjadi terpusat. Kegiatan operasi yang menonjol pada kurun waktu 1970-an adalah Operasi Seroja dalam rangka integrasi Timor Timur kepada RI. TNI AL berperan aktif dalam operasi pendaratan pasukan, operasi darat gabungan, dan pergeseran pasukan melalui laut.

Mulai dasawarsa 1980-an TNI AL melakukan langkah modernisasi peralatan tempurnya, kapal - kapal perang buatan Eropa Timur yang telah menjadi inti kekuatan TNI AL era 1960 dan 1970-an dinilai sudah tidak memenuhi tuntutan tugas TNI AL. Memburuknya hubungan RI - Uni Sovyet pasca pemerintahan Presiden Soekarno membuat terhentinya kerja sama militer kedua negara. Oleh karena itu TNI AL beralih mengadopsi teknologi Barat untuk memodernisasi kekuatan dan kemampuannya dengan membeli kapal - kapal perang dan peralatan tempur utama lainnya dari berbagai negara, diantaranya Korvet berpeluru kendali kelas 'Fatahillah' dari Belanda, Fregat berpeluru kendali klas 'Van Speijk' eks- AL Belanda, Kapal selam klas 209/1300 buatan Jerman Barat, Kapal tempur cepat berpeluru kendali klas 'Patrol Ship Killer' buatan Korea Selatan, dan Pesawat Patroli Maritim 'Nomad-Searchmaster' eks-Angkatan Bersenjata Australia. Pada saat yang sama TNI AL mengembangkan militer non tempur yang berupa operasi bakti kemanusiaan Surya

Bhaskara Jaya di berbagai daerah terpencil di Indonesia yang hanya bisa dijangkau lewat laut. Operasi ini berintikan kegiatan pelayanan kesehatan, pembangunan dan rehabilitasi sarana publik, dan berbagai penyuluhan dibidang kesehatan, hukum, dan bela negara. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun hingga sekarang. Sejumlah negara juga pernah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut antara lain Singapura, Australia dan Negara Amerika Serikat.

Selama dasawarsa 1990-an TNI AL mendapatkan tambahan kekuatan berupa kapal - kapal perang jenis korvet klas 'Parchim', kapal pendarat tank (LST) klas 'Frosch', dan Penyapu Ranjau klas Kondor. Penambahan kekuatan ini dinilai masih jauh dari kebutuhan dan tuntutan tugas, lebih - lebih pada masa krisis multidimensional ini yang menuntut peningkatan operasi namun perolehan dukungannya sangat terbatas. Reformasi internal di tubuh TNI membawa pengaruh besar pada tuntutan penajaman tugas TNI AL dalam bidang pertahanan dan keamanan di laut seperti reorganisasi dan kesamaan fungsinya dan pemekaran organisasi Korps Marinir dengan pembentukan satuan setingkat validasi Armada yang tersusun dalam flotila - flotila kapal perang sesuai dengan divisi Pasukan Marinir-I di Surabaya dan setingkat Brigade berdiri sendiri di Jakarta. Pembinaan - pembenahan tersebut merupakan bagian dari tekad TNI AL menuju Hari Esok yang Lebih Baik.

Sejak dikeluarkannya Supersemar, yang menandakan berakhirnya era Soekarno dari jabatan presiden dan digantikan Menteri Panglima Angkatan Darat Soeharto yang berlatar belakang militer membuat sepak terjang ABRI dalam politik semakin erat pada era berikutnya. ABRI mempunyai dua peranan yang cukup signifikan yang dikenal dengan "Dwi Fungsi ABRI" yakni selain sebagai kekuatan pertahanan keamanan, ABRI juga merupakan kekuatan sosial politik. Dwi Fungsi ABRI berkembang di era Orde Baru, ABRI ingi tidak hanya berperan dalam dunia militer pertahanan keamanan saja, namun meluas pada bidang sosial politik karena keduanya saling berkesinambungan.

Landasan konseptual yang digunakan pada masa pemerintahan Soeharta yang memiliki latar belakang militer sebelum menjadi presiden adalah :

- a. Patrimonialisme, dimana kekuatan penguasa tergantung pada kapasitas penguasa untuk memenangkan dan mempertahankan kesetiaan elit politik kunci atau suatu pendekatan yang dilakukan untuk menciptakan sebuah situasi dimana sang

pemimpin dapat mengendalikan orang lain dengan menggunakan cara-cara seperti adu domba guna menjunjung tinggi sang penguasa.

b. Nepotisme. Pemerintah Soeharto dituding melakukan tindak KKN yang tentunya merugikan rakyat Indonesia. Nepotisme sering dimaknai suatu tindakan pelanggaran hukum karena telah memanfaatkan kedudukan yang dimiliki untuk menarik masuk pihak lain yang memiliki hubungan darah atau ikatan keakraban lainnya ke sebuah jabatan. pemerintahan Soeharto di dalam pemerintahannya kebanyakan dari keluarga besarnya maupun orang-orang yang memiliki kekerabatan yang dekat dengannya.

c. System Politik. System politik bersifat terbuka yang dipengaruhi system-sistem yang lain berupa sejarah perkembangan, kesukuan, status sosial, atau konsep tentang kekuasaan. Dalam system politik juang terdapat empat variabel antara lain kekuasaan, kepentingan, kebijaksanaan dan budaya politik.

d. Dwi Fungsi ABRI. Landasan hukum Yuridis Dwi Fungsi ABRI berdasarkan UU No 80 tahun 1985 sedangkan landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945 Pasal 2 ayat 1 yang memposisikan ABRI sebagai golongan fungsional. Konsep Dwi Fungsi ABRI dipakai sebagai jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik dibidang hankam maupun dibidang kesejahteraan bangsa dalam rangka mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. ABRI sebagai kekuatan sosial mempunyai dua fungsi yaitu fungsi stabilisator dan fungsi dinamisator.

1) ABRI sebagai dinamisator. Kemampuan ABRI untuk berkomunikasi dengan rakyat serta merasakan aspirasi serta kebutuhan-kebutuhan rakyat, memungkinkan ABRI untuk secara nyata membimbing, menggugah dan mendorong masyarakat untuk lebih giat melakukan partisipasi dalam pembangunan.

2) ABRI sebagai stabilisator. Kesadaran nasional yang tinggi yang dimiliki oleh setiap prajurit ABRI merupakan suatu penangkal yang efektif terhadap pengaruh sosial yang bersifat negative dari budaya serta nilai-nilai asing yang membanjiri masyarakat Indonesia. ABRI dapat menetralsir ketegangan, gejolak-gejolak dan keresahan-keresahan yang melanda masyarakat.



Intervensi ABRI dalam bidang politik pada masa orde baru yang mengatasmakan Dwi Fungsi ABRI salah satunya dengan menempatkan militer di DPR, MPR maupun DPD tingkat Provinsi dan Kabupaten. Perwira yang aktif, sebanyak seperlima dari jumlahnya menjadi anggota DPRD, dimana mereka bertanggungjawab kepada komandan setempat, sedangkan yang di DPR/MPR tingkat nasional bertanggung jawab kepada Panglima ABRI. Keikutsertaan militer dalam politik secara umum bersifat anti partai. Militer percaya bahwa mereka merupakan pihak yang setia kepada modernisasi pembangunan, sedangkan partai politik dipandang memiliki kepentingan golongan sendiri. Partai-partai politik pada masa orde baru :

- 1) Partai Golkar. Kelahiran partai Golkar tidak lepas dari peran dan dukungan militer, yang pada saat itu merupakan bentuk reaksi terhadap meingkatnya kampanye PKI.
- 2) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai PPP lahir pada tanggal 5 Januari 1973, merupakan partai yang beraliansi islam ditandatangani oleh NU, Parmusi, PSII dan Perti.
- 3) Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai bersifat nasionalis seperti PNI, Murba, IPKI serta Parkindo dan partai Katolik.

Dwi fungsi ABRI mempunyai dampak negatif. Dampak negatif nya adalah berkurangnya jatah kaum sipil dibidang pemerintahan karena pemerintahan dalam pelaksanaannya didominasi oleh ABRI, selain itu dampak yang lebih buruk lagi yaitu kecendrungan ABRI untuk bertindak represif dan tidak demokratis/otoriter, ABRI menjadi alat penguasa yakni dengan adanya Dwi Fungsi ABRI maka ABRI bebas bergerak untuk menjabat di pemerintahan, kemudian dampak buruk lainnya tidak berjalannya fungsi control oleh parlemen sehingga banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, selain itu juga praktek nepotisme makin tumbuh subur di Indonesia.

Dampak positif dari Dwi Fungsi ABRI banyak dirasakan oleh kalangan internal ABRI khususnya dalam bidang materi. Banyak anggota ABRI mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan bahkan mengalahkan masyarakat sipil.

## 9. Makna Pembelajaran Sejarah

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pembelajaran sejarah sebenarnya memiliki makna yang strategis. Pembelajaran sejarah adalah suatu proses untuk membantu mengembangkan potensi dan kepribadian peserta didik melalui pesan-pesan sejarah agar menjadi warga bangsa yang arif dan bermartabat. Sejarah dalam hal ini merupakan totalitas dari aktivitas manusia di masa lampau (Walsh, 1967), dan sifatnya dinamis. Maksudnya, bahwa masa lampau itu bukan sesuatu final, tetapi bersifat terbuka dan terus berkesinambungan dengan masa kini dan yang akan datang. Karena itu sejarah dapat diartikan sebagai ilmu yang meneliti dan mengkaji secara sistematis dari keseluruhan perkembangan masyarakat dan kemanusiaan di masa lampau dengan segala aspek kejadiannya, untuk kemudian dapat memberikan penilaian sebagai pedoman penentuan keadaan sekarang, serta cermin untuk masa yang akan datang.

Lebih jauh pengertian sejarah juga berkait dengan persoalan kemanusiaan dan sebuah teater di mana manusia menjadi pemain watak, berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keteladanan yang sudah ada. Sejarah akan mendidik manusia untuk memahami “sangkan paran “ dan keberadaan dirinya (Soedjatmoko, 1986) sehingga dapat memperkuat identitas diri dan identitas nasional, atau identitas sebagai suatu bangsa. Dalam kaitan ini maka pembelajaran sejarah berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah adalah suatu orientasi intelektual, dan suatu sikap jiwa untuk memahami keberadaan dirinya sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai suatu bangsa (Soedjatmoko, 1986). Taufik Abdullah (1974) menegaskan bahwa kesadaran sejarah tidak lain adalah kesadaran diri. Kesadaran diri dapat dimaknai sadar akan keberadaan dirinya sebagai individu, sebagai makhluk sosial termasuk sadar sebagai bangsa dan sadar sebagai makhluk ciptaan Tuhan (Sardiman A.M., 2005). Dalam konteks ini pada diri manusia sebenarnya ada dua dimensi, yakni dimensi kekhalifahan dan dimensi kehambaan.

Dengan pemahaman tersebut, pembelajaran sejarah dituntut paling tidak dapat mengaktualisasikan dua hal yakni: (1) pendidikan dan pembelajaran intelektual, (2) pendidikan dan pembelajaran moral bangsa, *civil society* yang demokratis dan bertanggungjawab kepada masa depan bangsa (Djoko Suryo, 1991). Hal yang *pertama* menuntut pembelajaran sejarah tidak hanya menyajikan pengetahuan faktual, namun dituntut untuk memberikan latihan berfikir kritis, mampu menarik kesimpulan, memahami

makna dari suatu peristiwa sejarah menurut kaidah dan norma keilmuan. Pertanyaan-pertanyaan mengenai mengapa dan bagaimana, penting untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran sejarah. Sementara itu hal yang *kedua* menunjuk pada pembelajaran sejarah yang berorientasi pada pendidikan kemanusiaan yang memperhatikan nilai-nilai luhur, norma-norma, dan aspek kemanusiaan lainnya.

Dengan mengembangkan dua hal: pendidikan intelektual dan pendidikan moral atau pendidikan kemanusiaan, maka arah pembelajaran sejarah diharapkan dapat mencapai tujuan yang menopang tercapainya tujuan pendidikan nasional. Pembelajaran sejarah akan dapat melandasi pendidikan kecerdasan intelektual, sekaligus ikut mendasari pendidikan yang berorientasi pada kecerdasan emosional bahkan kecerdasan spiritual dalam rangka meningkatkan martabat manusia Indonesia. Dalam pelaksanaan di sekolah, tujuan pembelajaran sejarah tersebut terkait dengan adanya tujuan yang dikenal dengan istilah *instructional effects* dan tujuan yang “mengikuti” atau tujuan lebih lanjut yang disebut *nurturant effects*. Mencermati rumusan tersebut, nampak jelas bahwa di samping aspek kognitif, dimensi afektif menempati porsi yang cukup penting dalam tujuan pembelajaran sejarah. Namun dalam kenyataannya timbul kritik bahwa pendidikan kita cenderung intelektualistik dan lebih banyak bersifat kognitif.

Begitu juga dalam pembelajaran sejarah masih cukup memprihatinkan. Pembelajaran sejarah lebih banyak hafalan dan bersifat kognitif. Akibatnya pembelajaran sejarah tidak mampu menjangkau kepada aspek-aspek moralitas, menyangkut kecerdasan emosional dan spiritual. Pembelajaran sejarah kita masih jarang yang mampu memasuki wilayah ranah afektif, seperti sikap arif, menumbuhkan semangat kebangsaan, bangga terhadap bangsa dan negerinya, apalagi sampai memahami hakikat dirinya sebagai manifestasi kesadaran sejarah yang paling tinggi, sehingga memunculkan sikap dan tindakan sebagaimana dicontohkan oleh para pejuang dan pahlawan kita.

#### **10. Membangun Nilai-Nilai Kepahlawanan.**

Pembelajaran sejarah, akan mengembangkan aktivitas pasif untuk melakukan telaah berbagai peristiwa, untuk kemudian dipahami dan diinternalisasikan kepada dirinya sehingga melahirkan contoh untuk bersikap dan bertindak. Dari sekian peristiwa itu antara lain pula ada pesan-pesan yang terkait dengan nilai-nilai kepahlawanan seperti keteladanan, rela berkorban, cinta tanah air, kebersamaan, kemerdekaan, kesetaraan,

nasionalisme dan patriotisme (I Kabul Budiyo, 2007). Beberapa nilai ini dapat digali dan dikembangkan melalui pembelajaran sejarah yang bermakna. Untuk itu memang sangat dituntut adanya kreativitas dari para Dosen sejarah. Para Dosen sejarah harus menggali dan mampu mentransformasikan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik.

Di dalam pelajaran sejarah banyak pokok bahasan atau topik-topik yang mengandung nilai-nilai kesejarahan tersebut. Misalnya ketika sedang membahas periode penjajahan, sangat tepat untuk mengaktualisasikan kembali nilai-nilai jati diri dan hak-hak individu atau hak-hak asasi manusia, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Bagaimana perlawanan yang dilancarkan oleh Sultan Agung, oleh Pangeran Diponegara, oleh Cut Nyak Dhien. Tokoh-tokoh ini berjuang tanpa pamrih demi kebebasan tanah tumpah darahnya, demi membela rakyat yang menderita akibat kekejaman kaum penjajah. Harta, jiwa dan raga dipertaruhkan demi tegaknya harga diri dan kedaulatan sebagai bangsa. Berbagai bentuk perjuangan ini secara dikotomis dapat diaktualisasikan nilai-nilai kemerdekaan. “Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Satu kalimat dari Pembukaan UUD 1945 ini secara kreatif dapat dibahas satu atau dua kali pertemuan. Para peserta didik diajak untuk memahami dan menghayati nilai-nilai kemerdekaan diri, nilai-nilai perikemanusiaan dan nilai keadilan untuk kemudian menjadi bagian dari sikap dan perilakunya. Dalam hal ini Dosen dituntut untuk mampu menjelaskan dan meyakinkan kepada peserta didik agar meresapi bahwa tindakan kaum penjajah di bumi Nusantara sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan sebagai hak-hak asasi manusia. Hak-hak individu yang paling asasi dirampas. Tidak ada kebebasan berserikat, tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat dan memeluk agama secara utuh. Padahal Tuhan menciptakan setiap bangsa, setiap manusia anggota masyarakat dalam keadaan sama, kecuali karena kadar keimanannya. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna dengan kedudukan mulia yakni sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi yang bertugas membangun dunia demi kemaslahatan semua orang. Jadi penjajahan sangat jelas bertentangan dengan fitrah dan ciptaan Tuhan. Membahas topik-topik pada periode penjajahan ini, peserta didik juga dapat diajak untuk menghayati dan menumbuhkan sikap patriotisme, sikap dan tindakan anti penjajahan. Harus diyakinkan kepada peserta didik bahwa tindak penjajahan itu adalah perilaku dholim karena menyengsarakan rakyat

banyak. Dalam konteks ini dapat diaktualisasikan konsep jihad, “dan barang siapa berjihad di jalan Tuhan, surga adalah pahalanya.”

Pembahasan topik-topik yang berkenaan dengan periode pergerakan nasional, Dosen perlu menekankan nilai-nilai nasionalisme, persatuan dan kesatuan di antara pluralisme atau keanekaragaman, toleransi dan saling menghargai. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan golongan. Tuhan telah menciptakan ini semua sebagai kekayaan dan kekuatan bangsa. Tuhan telah mengajarkan kepada kita bahwa diciptakan-nya manusia bersuku-suku dan golongan-golongan agar kita saling mengenal dan menjalin tali silaturahmi. Kalau sudah demikian maka dengan didorong oleh keinginan luhur yakni cita-cita ingin merdeka, maka terwujudlah persatuan dan kebersamaan. Usaha untuk mewujudkan persatuan ini berhasil dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda yang menyatakan satu tanah air, satu bangsa: Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yakni Bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi simbol kebersamaan dalam keanekaragaman dan sekaligus memberikan semangat untuk menggalang persatuan demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan. Sumpah Pemuda adalah wujud nyata dari silaturahmi nasional, “dan barang siapa yang mau menghidup-hidupkan silaturahmi maka akan dipanjangkan usianya dan diluaskan rezekinya.” Inilah konsep nasionalisme yang dibimbing oleh nilai-nilai moral, nilai-nilai keagamaan yang oleh Toynbee dikatakan sebagai nasionalisme yang dibimbing oleh nilai-nilai universal agama-agama atas (*higher religions*) (lih. A. Syafii Maarif, 1989). Nasionalisme yang tidak dibimbing oleh nilai-nilai moral keagamaan, dapat terjebak pada dua kecenderungan. Pertama, nasionalisme yang sekuler, ekstrim berlebihan yang dapat melahirkan chauvinisme. Bentuk nasionalisme inilah yang dikritik oleh Toynbee, karena telah menyebabkan berkobarnya PD II yang menghancurkan peradaban manusia. Kedua, nasionalisme yang lemah sehingga menjadikan pendukungnya tidak memiliki kebanggaan nasional dan jati diri bangsa. Yang kedua ini sangat erat kaitannya dengan model pembelajaran yang hanya kognitif. Dosen secara kreatif dapat membahas materi ini, misalnya dengan topik “Telaah Teks Sumpah Pemuda”

Selanjutnya untuk membahas topik-topik yang terkait dengan materi ajar pada periode kemerdekaan, Dosen dapat mengaktualisasikan dan menanamkan nilai-nilai esensial yang relevan kepada para peserta didik, seperti nilai-nilai kemerdekaan, kemandirian dan kebebasan yang bertanggung jawab, patriotisme, masalah

kepemimpinan dan keteladanan, yang telah dipertunjukkan oleh para pejuang dan pahlawan nasional kita. Agar lebih menumbuhkan kesadaran dan merangsang emosi peserta didik, Dosen sebagai fasilitator dan motivator dapat membelajarkan peserta didik untuk menelaah biografi tokoh pejuang atau pahlawan tertentu, misal Bung Karno, Bung Hatta, Panglima Besar Jenderal Sudirman, Sultan Hamengku Buwono IX untuk mendapatkan nilai-nilai kejuangan, kepemimpinan dan keteladanan.

Pembelajaran topik-topik dan nilai-nilai pada periode kemerdekaan itu akan lebih “dahsyat” (sangat bermakna), apabila Dosen secara kreatif mau memberi sentuhan dan atau menggunakan perspektif spiritualisme atau nilai-nilai moral. (Uraian di atas sebenarnya sudah banyak disinggung). Contoh ilustrasi tentang kemerdekaan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan fitrah dan hak asasi manusia sebagai ciptaan Tuhan. Karena itu wajar kalau bangsa Indonesia berusaha dengan segala daya, dengan penuh pengorbanan baik jiwa, raga maupun harta. Dengan semboyan “merdeka atau mati” dan disertai dengan semangat jihad, bangsa Indonesia akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk sebuah kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hal yang sangat asasi dan tahapan sangat penting bagi eksistensi suatu bangsa.

### BAB III NILAI-NILAI TNI 1945

#### 11. Pewarisan nilai-nilai 45 kepada generasi muda TNI

Sebagai akibat proses lahirnya TNI pada tahun 1945 maka TNI, di samping ada persamaan dengan tentara lain di dunia, juga mempunyai perbedaannya. Perbedaan itu terutama akibat dari kenyataan bahwa TNI lahir karena *levee en masse* (kebangkitan rakyat) dan bukan karena dibentuk oleh Pemerintah. Kenyataan itu mengakibatkan TNI mempunyai karakteristik tertentu yang dinamakan *kejuangan TNI*, satu hal yang tidak ada pada kebanyakan tentara lain di dunia dan mewariskan nilai-nilai berupa konsep abstrak mengenai suatu masalah dasar berupa norma agama, budaya dan moral bangsa yang sangat penting dalam kehidupan dan mempengaruhi tingkah laku. Nilai 45 adalah norma yang telah didapat dan disepakati sebagai ukuran dari sifat/perbuatan dan dinyatakan dalam kualitas. Angka 45 menunjukkan tahun yang merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia yang merupakan kekuatan batin dalam merebut, mempertahankan kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat, dan mengisi kemerdekaan dalam mengkomodasi etos kejuangan bangsa sehingga dapat memproklamasikan kemerdekaan bangsa dan menjadi sumber kehidupan dalam ruang lingkup mahluk Tuhan Yang Maha Esa, perjuangan bangsa.

- a. Pewarisan nilai-nilai 45 kepada generasi muda TNI.
  - 1) Tujuan adalah terpeliharanya identitas TNI .
  - 2) Maksud adalah terwujud ketahanan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  - 3) Azas :
    - a) Pancasila → Ham, Kebhinekaan, Demokrasi.
    - b) UUD 1945 → Pewarisan dan integrasi Ketahanan bernegara dan berbangsa.
- b. Aspek-aspek integrasi nilai dan prinsip yang diwariskan:
  - 1) Nilai-nilai yang disepakati rakyat Indonesia.

- a) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
  - b) Sila-sila dari Pancasila.
- 2) Nilai-nilai pembukaan UUD 1945.
  - 3) Prinsip-prinsip penjelmaan yang disepakati rakyat.
  - 4) Identitas TNI sebagai tentara pejuang.
  - 5) Nilai-nilai TNI 1945.
  - 6) Nilai integratif, Nilai stabilisasi dan dinamisasi TNI .
- c. Pola-pola pewarisan dan integrasi:
- 1) Sosialisasi :
    - a) terpelihara identitas dalam instansi TNI, aparatur pemerintah dan masyarakat
    - b) Ruang lingkup→generasi muda TNI dan non TNI.
    - c) Metode→ diskusi , tauladan, dll.
  - 2) Tauladan : memberi contoh positif yang terdapa pada nilai-nilai 1945 terhadap generasi TNI melalui Santiaji, Santi Karma.
  - 3) Edukasi melalui sistem pendidikan TNI dan kurikulum TNI yang mencerminkan “ Dwi Warna Purwa Cendikian Wusana”.
  - 4) Komunikasi=menjalin hubungan harmonis generasi TNI, non TNI, masyarakat sesuai nilai-nilai 1945.
  - 5) Integrasi Nasional : usaha untuk mewujudkan integritas Nasional melalui persatuan , kesatuan , kekompakkan dan keutuhan nasional di segala bidang IPOLEKSUSBUD berdasarkan “Bhineka Tunggal Ika “ .
- d. Kode etik Perwira. “Budi Bakti Wira Utama “
- 1) Budi → Berbudi Luhur.
  - 2) Bhakti→ Berbakti pada bangsa dan negara Indonesia.
  - 3) Wira→Bersifat kesatria.
  - 4) Utama→ menjunjung tinggi keutamaan dan kehormatan korps perwira TNI.



## 12. Rumusan Jiwa, Semangat, dan Nilai-nilai 45

Rumusan Jiwa, Semangat dan Nilai - nilai Perjuangan 45 adalah sebagai berikut:

- a. Jiwa adalah sesuatu yang menjadi sumber kehidupan dalam ruang lingkup makhluk Tuhan yang maha esa. Jiwa bangsa adalah kekuatan batin yang terkandung dalam himpunan nilai – nilai pandangan hidup suatu bangsa.
- b. Semangat adalah manifestasi dinamis atau ekspresi jiwa yang merupakan dorongan untuk bekerja dan berjuang. Jiwa dan semangat suatu bangsa menentukan kualitas nilai kehidupannya.
- c. Nilai adalah suatu penyifatan yang mengandung konsepsi yang diinginkan dan memiliki keefektifan yang mempengaruhi tingkah laku.
- d. Jiwa 45 adalah Sumber kehidupan bagi perjuangan bangsa Indonesia yang merupakan kekuatan batin dalam merebut kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat serta mengisi dan mempertahankannya.
- e. Semangat 45 adalah Dorongan dan manifestasi dinamis dari Jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan bangsa, menegakkan kedaulatan rakyat serta mengisi dan mempertahankannya.
- f. Nilai 45 adalah nilai - nilai yang merupakan perwujudan jiwa dan Semangat 45 bersifat konseptual yang menjadi keyakinan, keinginan dan tujuan bersama bangsa Indonesia dengan segala keefektifan yang mempengaruhi tindak perbuatan Bangsa dalam merebut kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat serta mengisi dan mempertahankannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara ketiga hal itu, yakni jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45 sesungguhnya terdapat keterkaitan yang sangat erat. Malahan dapat dikatakan bahwa hal-hal tersebut dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan dan harus dilihat sebagai satu-kesatuan yang bulat dan utuh.

## 13. Metode pelestarian jiwa, semangat dan nilai - nilai 45

- a. Metode Edukasi : Metode dimana tujuannya untuk menanamkan dasar yang kuat untuk penghayatan dan pengamalan jiwa, semangat dan nilai - nilai 45.

- b. Metode Keteladanan : Melalui metode ini kita bias memberikan keteladanan kepada orang lain dalam menghayati dan mengamalkan jiwa, semangat dan nilai - nilai 45.
- c. Metode Informasi dan Komunikasi : Metode informasi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sifatnya searah. Tujuannya tidak hanya terbatas memberikan penjelasan saja, tetapi dapat memberi ajakan, dorongan dan motivasi kepada orang lain.
- d. Metode Sosialisasi : Metode ini merupakan upaya untuk menyampaikan pesan yang terkandung dalam jiwa, semangat dan nilai - nilai 45 dalam ruang lingkup masyarakat.

**14. Pola pelaksanaan Pedoman Umum Pelestarian jiwa, semangat dan nilai - nilai 45.**

- a. Pendekatan Edukasi
  - 1) Jalur keluarga : Orang tua berkewajiban mendidik anak – anaknya supaya tanggap dan peka terhadap keadaan dan perkembangan lingkungan, pertumbuhan anak - anaknya, penyebarluasan JSN 45.
  - 2) Jalur masyarakat : Sejalan dengan pendidikan formal melalui jalur sekolah hendaknya pendidikan diluar sekolah juga dimanfaatkan dengan sebaik - baiknya.
  - 3) Jalur Sekolah : Pendekatan edukasi melalui jalur pendidikan formal (sekolah) yang terikat pada ruang, waktu, mata pelajaran (kurikulum) dan jenjang persekolahan bertujuan untuk menanamkan JSN 45 melalui proses belajar mengajar.
- b. Pendekatan Keteladanan
  - 1) Jalur Keluarga : Pendekatan ini menyangkut sikap, tingkah laku, serta penghayatan dan pengamalannya.
  - 2) Jalur Sekolah : Merupakan forum pendidikan formal yang memegang peran utama dalam usaha melestarikan JSN 45 terutama dalam upaya guru sebagai pendidik dan tokoh panutan yang sangat berperan menciptakan kondisi yang

memungkinkan para anak didik akan dapat menghayati dan mengamalkan JSN 45.

3) Jalur Masyarakat : Melalui jalur masyarakat peranan dan keteladanan tokoh - tokoh masyarakat, para pemimpin informal yang berada ditengah - tengah lingkungan masyarakat sangat membantu dan menentukan untuk penghayatan dan pengamalan JSN 45.

c. Pendekatan Informasi dan Komunikasi.

1) Jalur Keluarga : Iklim yang sejuk dalam keluarga akan membantu dalam pelaksanaan kelestarian JSN 45.

2) Jalur Sekolah : Dalam lingkungan sekolah perlu adanya iklim keterbukaan dari kedua belah pihak yaitu pendidik dan peserta didik dan diharapkan mereka mampu mendalami dan mengerti JSN 45.

3) Jalur Masyarakat : Penyampaian pesan melalui keteladanan kepada masyarakat juga menyangkut hubungan timbal balik antara pemimpin dan yang dipimpin.

d. Pendekatan Sosialisasi : Tujuan pendekatan sosialisasi agar masyarakat mengerti, menghayati dan mengamalkan JSN 45.

e. Pendekatan jalur Agama : Pendekatan jalur agama adalah dimana pelestarian JSN 45 akan lebih mudah dalam kehidupan beragama, demikian pula Alim ulama dan tokoh - tokoh agama sangat menentukan kelestarian JSN 45.

## 15. Pewarisan Nilai-nilai Proklamasi

### PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945  
Atas Nama Bangsa Indonesia

Soekarno Hatta

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan hasil jerih payah bangsa Indonesia sendiri yang didorong oleh rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan bukanlah hadiah atau pemberian dari negara lain. Lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi dari perjuangan bangsa Indonesia, ini berarti bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya pada saat diproklamasikan. Puncak bukanlah akhir, oleh karena itu perjuangan belum berhenti atau sudah selesai karena itu kita sebagai generasi muda harus tetap berjuang dan rela berkorban untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan di segala bidang kehidupan.

Proklamasi berarti juga bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan sekaligus membangun suatu rumah tangga baru, yaitu Negara Republik Indonesia. Dengan proklamasi itu berarti bangsa Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri, dapat memulai mengatur rumah tangga bangsa dan negaranya sendiri tanpa campur dari negara lain. Proklamasi kemerdekaan bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan alat untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban moral atas kemerdekaan itu, dan mengisinya dengan pembangunan di segala bidang kehidupan.

Berdasarkan uraian di atas, proklamasi kemerdekaan mengandung makna:

- a) Secara yuridis (hukum) proklamasi merupakan saat mulai berlakunya tertib hukum nasional dan berakhirnya tertib hukum kolonial
  - b) Secara politis dan sosiologis, proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri dalam suatu kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Era merebut dan mempertahankan kemerdekaan mengandung nilai juang yang paling kaya dan lengkap sebagai titik kulminasinya adalah pada perang Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nilai-nilai perjuangan yang terkandung dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan adalah sebagai berikut :
- 1) Nilai perjuangan religius (iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa)
  - 2) Nilai perjuangan rela dan ikhlas berkorban.
  - 3) Nilai perjuangan tidak mengenal menyerah
  - 4) Nilai perjuangan harga diri

- 5) Nilai kejuangan percaya diri.
- 6) Nilai kejuangan pantang mundur.
- 7) Nilai kejuangan patriotisme.
- 8) Nilai kejuangan heroisme.
- 9) Nilai kejuangan rasa senasib dan sepenanggungan.
- 10) Nilai kejuangan rasa setia kawan.
- 11) Nilai ke juangan nasionalisme dan cinta tanah air
- 12) Nilai kejuangan persatuan dan kesatuan.

16. **Ruang Lingkup** : Pengertian, Pokok-Pokok Kaidah Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Hakekat Pancasila Falsafah Negara, Hal – Hal Pokok Kenegaraan dan Realisasi Pancasila dan materi Pembahasan:

- a. Pengertian Materi adalah : Landasan Falsafah bagi pegangan hidup bangsa sebagai pedoman dasar yang berakar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yaitu Pancasila, yang dijadikan pegangan TNI dalam berintegrasi dengan masyarakat.
- b. Pokok Kaidah yang fundamente (Pancasila), mengandung beberapa unsur mutlak : Dalam hal terjadinya ditentukan oleh Pembentuk negara dan hal isi memuat dasar-dasar penyelenggaraan dan cita-cita negara serta sebagai sumber hukum dari pada UUD 1945.
- c. Pembukaan UUD 1945 menurut sejarah terjadi :
  - 1) Ditetapkan Pembentuk negara (Panitia UUD).
  - 2) Memuat azas-azas Falsafah negara (Pancasila).
  - 3) Azas Politik (Demokrasi Rakyat).
  - 4) Tujuan Negara (Pembukaan UUD 1945).
- d. Hakekat Pancasila Dasar Falsafah Negara :
 

Susunan Pancasila adalah hirarki dan bentuk yang piramidal, yang menggambarkan hubungan antar sila dengan sila lain. Hubungan antar sila dengan sila lain :

- 1) Hubungan antar sila dengan mengikat dan kesatuan yang bulat.
  - 2) Tiap-tiap sila mengandung sila-sila lainnya.
  - 3) Memungkinkan penyesuaian tempat dan waktu agar pokok pangkal sila satu dengan lain, dengan tidak saling menggagalkan.
  - 4) Rumusan sila –sila Pancasila adalah merupakan satu kesatuan.
- e. Pengertian Pancasila yang dirumuskan secara ilmiah digolongkan beberapa tingkatan sebagai berikut :
- 1) Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang mutlak dan obyektif.
  - 2) Pancasila sebagai pedoman penyelenggara negara.
  - 3) Pancasila sebagai politik negara.
- f. Hal-Hal Pokok Kenegaraan :
- 1) Hakekat dan sifat negara-negara adalah lembaga kemanusiaan secara lahir dan batin serta hakekat negara didasarkan secara lahir dan batin serta hakekat negara didasarkan atas pokok bersendi atas sifat individu dan sosial.
  - 2) Sistem Negara adalah demokrasi, sehingga identik dengan Hakekat dan Sifat manusia.
  - 3) Tujuan serta Hakekatnya Negara :
    - a) Bersifat Nasional, Cita-cita Nasional.
    - b) Bersifat Nasional → ikut menjaga ketertiban dunia dan keadilan sosial.
  - 4) Kerakyatan → dari, oleh dan untuk rakyat
- g. Realisasi pelaksanaan Pancasila dasar falsafah negara sebagai berikut :
- 1) Pengetahuan –sadar ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - 2) Kesadaran-mengetahui perkembangan masyarakat.
  - 3) Ketaatan – dalam kewajiban lahir dan batin.
  - 4) Watak dan nurani agar mawas diri.

## **BAB VI**

### **NASIONALISME**

#### **17. Pengertian Nasionalisme**

Nasionalisme berasal dari kata nation (bangsa). Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan/warga negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsanya. Nasionalisme merupakan suatu paham yang mengutamakan persatuan dan kebebasan bangsa. Nasionalisme memuat beberapa prinsip yaitu: kesatuan, kebebasan, kesamaan, kepribadian, dan prestasi. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai perpaduan dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Dengan semangat kebangsaan yang tinggi, kekhawatiran akan terjadinya ancaman terhadap keutuhan bangsa akan dapat dihindarkan.

Nasionalisme merupakan sebuah penemuan sosial yang paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah manusia, paling tidak seratus tahun terakhir. Tidak ada satupun ruang sosial di muka bumi yang lepas dari pengaruh ideologi ini. Tanpa nasionalisme, lajur sejarah manusia akan berbeda sama sekali. Berakhirnya perang dingin dan semakin merebaknya gagasan dan budaya globalisme (internasionalisme) pada dekade 1990-an hingga sekarang, khususnya dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang dengan sangat pesat. Nasionalisme yang melahirkan bangsa berada di titik persinggungan antara politik, teknologi dan transformasi sosial.

Menurut John Hutchinson (2000:34) Nasionalisme lebih merupakan sebuah fenomena budaya daripada fenomena politik karena dia berakar pada etnisitas dan budaya promodern. Kalaupun nasionalisme bertransformasi menjadi sebuah gerakan politik, hal tersebut bersifat superfisial karena gerakan-gerakan politik nasionalisme pada akhirnya dilandasi oleh motivasi budaya, khususnya saat terjadi krisis identitas kebudayaan. Pada sudut pandang ini, gerakan politik nasionalisme adalah sarana mendapatkan kembali harga diri etnik sebagai modal dasar membangun sebuah negara berdasarkan kesamaan budaya. Semangat kebangsaan akan mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban dan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme. Rasa kesetiakawanan sosial akan mempertebal semangat kebangsaan suatu bangsa.

Semangat rela adalah kesediaan untuk berkorban demi kepentingan yang besar atau demi negara dan bangsa telah mengantarkan bangsa Indonesia untuk merdeka. Bagi bangsa yang ingin maju dan mencapai tujuannya, selain memiliki semangat rela berkorban, juga harus didukung dengan jiwa patriotik yang tinggi. Makna nasionalisme:

- a. Suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi harus diserahkan pada negara
- b. Suatu perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah
- c. Suatu proses pembetulan atau pertumbuhan bangsa-bangsa
- d. Suatu bahasa dan simbolisme bangsa
- e. Suatu gerakan sosial dan politik demi kepentingan bangsa
- f. Suatu doktrin atau ideologi bangsa, baik umum maupun khusus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “ nasionalisme berasal dari kata *nasional* dan *isme* yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebangsaan bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa,” Menurut Hitler dalam Chotib dan Djazuli (2007 :24) “ nasionalisme adalah sikap dan semangat berkorban untuk melawan bangsa lain” .

Nasionalisme memiliki beberapa bentuk-bentuk menurut Retno Listyarti (2007:28) antara lain:

- a. Nasionalisme kewarganegaraan (nasionalisme sipil) adalah nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari partisipasi aktif rakyatnya. Keanggotaan suatu bangsa bersifat sukarela. Bentuk nasionalisme ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan tulisannya.
- b. Nasionalisme etnis atau etnonasionalisme adalah dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Keanggotaan suatu bangsa bersifat turun-temurun.
- c. Nasionalisme romatik adalah bentuk nasionalisme etnis dimana negara memperoleh kebenaran politik sebagai suatu yang alamiah dan merupakan ekspresi dari bangsa atau ras. Nasionalisme romantik menitik beratkan pada budaya etnis yang sesuai dengan idealisme romantik
- d. Nasionalisme budaya adalah nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan tidak bersifat turun-temurun seperti warna



kulit

- e. Nasionalisme kenegaraan adalah merupakan variasi nasionalisme kewarganegaraan yang sering dikombinasikan dengan nasionalisme etnis .
- f. Dalam nasionalisme kenegaraan bangsa adalah suatu komunitas yang memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan kekuatan negara.
- g. Nasionalisme agama adalah nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama.

Selain itu, pada dasarnya nasionalisme yang muncul di negara-negara yang memiliki tujuan nasionalisme sebagai berikut :

- a. Menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban.
- b. Menghilangkan ekstremisme (tuntutan yang berlebihan ) dari warga negara (individu dan kelompok).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan/warga negara yang secara bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa.

## 18. Prinsip-prinsip Yang Terkandung Dalam Nasionalisme

Nasionalisme dalam arti luas adalah paham kebangsaan yang meletakkan kesetiaan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnya dengan memandang bangsanya itu merupakan bagian dari bagian lain di dunia. Nasionalisme dalam arti luas mengandung prinsip-prinsip yaitu kebersamaan, persatuan dan kesatuan serta demokrasi/demokratis.

- a. Prinsip kebersamaan. Prinsip kebersamaan menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan,
- b. Prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip persatuan dan kesatuan menuntut setiap warga negara harus mampu mengesampingkan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan dan anarkis (merusak), untuk menegakkan prinsip persatuan dan kesatuan setiap warga negara harus mampu mengedepankan sikap: kesetiakawan sosial, peduli terhadap sesama, solidarias dan berkeadilan sosial.

Prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi memandang: bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, karena hakikanya kebangsaan adalah adanya tekad unuk hidup bersama mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang tumbuh dan berkembang dari bawah untuk bersedia hidup sebagai bangsa yang bebas, merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

## 19. Patriotisme

Patriotisme berasal dari kata Patriot, yang artinya adalah pecinta dan pembela tanah air. Sedangkan Patriotisme maksudnya adalah semangat cinta tanah air. Pengertian Patriotisme adalah sikap untuk selalu mencintai atau membela tanah air, seorang pejuang sejati, pejuang bangsa yang mempunyai semangat, sikap dan perilaku cinta tanah air, dimana ia rela mengorbankan segala-galanya termasuk jiwanya demi kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran tanah air. Mangun hardjana (1985:33) menyebutkan beberapa ciri patriotisme yang sejati, yaitu:

- a. Membuat kita mampu mencintai bangsa dan negara sendiri, tanpa menjadikannya sebagai tujuan untuk dirinya sendiri melainkan menciptakannya menjadi suatu bentuk solidaritas untuk mencapai kesejahteraan masing-masing dan bersama seluruh warga bangsa dan negara. Patriotisme sejati adalah solider secara bertanggung jawab atas seluruh bangsa.
- b. Berani melihat diri sendiri seperti apa adanya dengan segala plus-minusnya, unsur positif negatifnya, dan menerimanya dengan lapang hati.
- c. Memandang bangsa dalam perspektif historis, masa lampau masa kini, dan masa depan. Patriotisme sejati adalah bermodalkan nilai-nilai dan budaya rohani bangsa, berjuang dulu masa kini, menuju cita-cita yang ditetapkan.
- d. Melihat, menerima, dan mengembangkan watak kepribadian bangsa sendiri. Patriotisme sejati adalah rasa memiliki identitas diri.
- e. Melihat bangsanya dalam konteks hidup dunia, mau terlibat didalamnya dan bersedia belajar dari bangsa-bangsa lain. Patriotisme bersifat terbuka.

Seseorang yang memiliki sikap dan perilaku patriotik ditandai oleh adanya hal-hal sebagai berikut.

- a. Rasa cinta pada tanah air
- b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara

- c. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
- d. Berjiwa pembaharu
- e. Tidak mudah menyerah

Menurut Ensiklopedi Indonesia, patriotisme adalah rasa kecintaan dan kesetiaan seseorang pada tanah air dan bangsanya, kekaguman pada adat kebiasaan, kenggaan terhadap sejarah dan kebudayaannya serta sikap pengabdian demi kesejahteraan bersama. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patriotisme adalah sikap dan semangat yang sangat cinta kepada tanah air sehingga berani berkorban jika diperlukan oleh negara.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Patriotisme adalah sikap yang bersumber dari perasaan cinta pada tanah air sehingga menimbulkan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negaranya.

## 20. **Membangun Karakter ( *Character Building* )**

Keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai tujuannya, tidak hanya ditentukan oleh dimilikinya sumber daya alam yang melimpah ruah, akan tetapi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa “Bangsa yang besar dapat dilihat dari kualitas/karakter bangsa (manusia) itu sendiri”. Dari segi bahasa membangun karakter (*character building*) yang terdiri dari dua kata yaitu membangun (*to building*) yang artinya bersifat memperbaiki, membina, dan mendirikan, sedangkan karakter (*character*) berarti tabiat, watak, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain.

Menurut Suhady (2008 :54) “ menyatakan bahwa membangun karakter adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan atau membentuk tabiat, watak, akhlak (budi pekerti), insan manusia (masyarakat) sehingga menunjukkan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila”.

Membangun karakter bangsa pada hakikatnya adalah agar suatu bangsa atau masyarakat itu memiliki karakter sebagai berikut :

- a. Adanya saling menghormati dan menghargai diantara sesama
- b. Adanya rasa kebersamaan dan tolong-menolong
- c. Adanya rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa

- d. Adanya rasa peduli dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- e. Adanya moral, akhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai agama
- f. Adanya perilaku dan sifat-sifat kejiwaan yang saling menghormati dan saling menguntungkan
- g. Adanya tingkah laku yang senantiasa menggambarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai hukum, dan nilai-nilai budaya
- h. Sikap dan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai kebangsaan

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa membangun karakter adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan membentuk tabiat, watak, akhlak (budi pekerti), insan manusia (masyarakat) sehingga menunjukkan tingkah laku yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

## 21. Wawasan Kebangsaan (Wawasan Nusantara)

Wawasan nusantara merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut dengan wawasan nusantara itu merupakan salah satu kosepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Wawasan nusantara sebagai pandangan geopoliti Indonesia, dalam pembangunan nasional. Secara etimologis wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya.

Menurut Wan Usman dalam Winarno (2006 : 122) “wawasan nusantara adalah cara pandangan bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam,” selanjutnya menurut kelompok kerja wawasan nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat Lemhanas tahun 1999” wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional, sedangkan menurut GBHN 2001 “wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis

dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

## **22. Rasa Cinta Tanah Air**

Rasa cinta tanah air atau nasionalisme adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan rasa loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, mencintai adat atau budaya yang ada di negaranya dengan melestarikan dan melestarikan alam dan lingkungan.

Rasa cinta tanah air dan bangsa yang terangkum dalam semangat patriotisme harus selalu tertanam dalam setiap sanubari rakyat Indonesia. Apalagi, akhir-akhir ini rasa nasionalisme tersebut kian dirasakan tidak sekuat dahulu. Untuk itu perlu digalangkan kembali semangat kebangsaan ini.

Generasi pada masa penjajahan berhasil membangkitkan rasa cinta tanah air dan bangsa yang akhirnya berhasil memerdekakan bangsa Indonesia. Kalau saja rasa cinta tanah air dan bangsa sekali lagi bisa menjadi faktor yang memotivasi bangsa Indonesia, ada kemungkinan bangsa Indonesia akan bisa bangkit kembali dengan masyarakatnya bisa menghasilkan karya-karya yang membanggakan.

Individu yang memiliki rasa cinta pada tanah airnya akan berusaha dengan segala daya upaya yang dimilikinya untuk melindungi, menjaga kedaulatan, kehormatan dan segala apa yang dimiliki oleh negaranya. Rasa cinta tanah air inilah yang mendorong perilaku individu untuk membangun negarnya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air perlu ditumbuh kembangkan dalam jiwa setiap individu yang menjadi warga dari sebuah negara atau bangsa agar tujuan hidup bangsa bersama dapat tercapai.

Rasa cinta tanah air dapat ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini agar dapat menghargai bangsa dan negaranya misalnya dengan upacara sederhana setiap hari senin dengan menghormati bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengucapkan Pancasila. Pentingnya sebuah lagu kebangsaan dan menjadi identitas dari negara tersebut, agar dapat mengingat kembali betapa pentingnya cinta terhadap negara.

**DAFTAR PUSTAKA**

*Pedoman Umum Pelestarian Jiwa, Semangat dan Nilai-Nilai 45.* (1988). Dewan Harian Nasional Angkatan 45.

Prof.Dr. Kaelan, M.S. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma 2016.

**TUGAS MATERI KEJUANGAN**

Dikumpulkan Paling Lambat Hari Jumat Tanggal 30 Juni 2017 ke email:  
jurmestn\_sttal@yahoo.com

1. Apa yang anda ketahui tentang Pancasila Sebagai Ideologi Nasional? Terangkan dan jelaskan secara singkat.
2. Apa yang anda ketahui tentang sejarah TNI AL? terangkan dan jelaskan.
3. Makna apa yang didapat saudara sebagai TNI AL dalam mempelajari sejarah TNI AL?
4. Sebutkan dan jelaskan dengan metode apa untuk pelestarian jiwa, semangat dan nilai - nilai 45?
5. Sebutkan dan jelaskan nilai-nilai kejuangan yang terkandung dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan?
6. Apa yang dimaksud dengan paham Nasionalisme dan Sikap patriotisme dan bagaimana pendapat anda untuk mengembangkannya paham dan sikap tersebut?

**“SELAMAT MENGERJAKAN “**